

## **Studi Kasus Intoleransi dan Diskriminasi pada Masa Kekuasaan Dinasti Umayyah 660-750 M: Kajian Sosio-Historis**

**Restu Dimas Prasetya**

UIN Sunan Ampel Surabaya

[sadewaeril@gmail.com](mailto:sadewaeril@gmail.com)

**Muhammad Bahrudin Rozi**

UIN Sunan Ampel Surabaya

[sila4green@gmail.com](mailto:sila4green@gmail.com)

**Abstract:** The period of the Umayyad Dynasty's rule from 660-750 AD was a very important era in Islamic history. It was the first time a dynastic form of governance was established in Islam. Furthermore, it can also be considered the peak of Islamic expansion. However, during this period, several cases of discrimination and intolerance against non-Muslims and non-Arabs also occurred. This study aims to examine cases of discrimination and intolerance towards non-Muslims and non-Arabs during the Umayyad rule, as an evaluation for us as Muslims today to prioritize tolerance (Tasamuh) towards fellow human beings, regardless of their religion, in order to realize a more harmonious life. This research uses historical research methods. From the primary and secondary sources we studied, we obtained the following results. 1) Acts of intolerance occurred during several military expeditions of the Umayyad Dynasty forces, such as the destruction of places of worship of other religions and intolerance against non-Muslims in political policies. 2) Reforms to address this were undertaken by Caliph Umar bin Abdul Aziz, who ruled from 717-720 AD; however, the short duration of Umar bin Abdul Aziz's rule caused these efforts to be halted in subsequent times. 3) Discrimination against non-Arabs during the late Umayyad Dynasty ultimately backfired, contributing to the collapse of the Umayyad Dynasty in 750 AD.

**Keywords:** Umayyad, intolerance, non-Muslim, non-Arab

### **PENDAHULUAN**

Dinasti Umayyah , berdiri pada 660 M, saat pendirinya, Muawiyah bin Abi Sufyan dinobatkan sebagai khalifah di Yerusalem, Palestina. Ibukota dinasti ini , terletak di Damaskus, Suriah. Pada 661 M, khalifah terakhir Khulafa Rasyidin, Ali bin Abi Thalib terbunuh dan putranya yang diakui Penduduk Irak sebagai penguasa, Al-Hasan, memilih menyerahkan kuasa pada Muawiyah. Dengan demikian, Dinasti Umayyah resmi berdiri sebagai sebuah negara. ( Hitti, 2006, hal.235-236)

Masa-masa Dinasti Umayyah, dapat dibilang merupakan puncak dari ekspansi Islam. Pada masa Kekuasaan Dinasti Umayyah, wilayah Islam meluas ke Asia Tengah antara 705-715 M, kemudian ke Pakistan dan India antara 710-713 M, serta Afrika Utara dan Spanyol antara abad ke 7-8 M. Philip.K.Hitti , menggambarkan Dinasti Umayyah sebagai sebuah Kerajaan yang lebih besar dibandingkan Romawi, dengan wilayah terbentang dari Pantai Biscay hingga Indus dan Perbatasan Tiongkok. ( Hitti, 2006, hal.258-268)

Namun, dibalik pesatnya perluasan wilayah Islam itu. Terjadi sejumlah kasus intoleransi yang menimpa Non Arab di wilayah kekuasaan dinasti raksasa tersebut, maupun Tindakan intoleransi yang dilakukan Pasukan Umayyah dalam melakukan perluasan wilayah. Pada operasi penaklukan Sindh (Pakistan) antara 710-713 M, misalnya, Baladzuri , penulis Kronik Futuhul Buldan (wafat 892 M) mencatat bahwa Tentara Dinasti Umayyah dibawah Muhammad bin Qasim, saat pengepungan Daibul , salah satu kota penting di Sindh, menyerang sebuah menara tempat patung-patung yang disucikan penduduk setempat dengan ketapel raksasa. Tempat yang diyakini sebagai rumah dewa oleh penduduk setempat, juga tak luput dari amukan Pasukan Umayyah. Bahkan, komandannya, Muhammad bin Qasim membunuh penjaga rumah tersebut. ( Baladzuri, 2015, hal.595-596)

Tindakan intoleransi , juga dipertontonkan Komandan Umayyah Qutaibah bin Muslim saat Pasukan Umayyah menaklukkan Samarkand, Uzbekistan.pada 712 M. Setelah menjatuhkan Pemerintahan Soghdia yang menguasai kota tersebut, Qutaibah sebagaimana dicatat oleh Baladzuri, membakar patung-patung yang disucikan penduduk setempat. ( Baladzuri, 2015, hal.575-576 dan Kennedy, 2020, hal.337-339).

Tidak hanya terjadi intoleransi, diskriminasi kerap terjadi dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah. Philip.K.Hitti, mencatat adanya diskriminasi terhadap etnik Non Arab, yaitu Persia dalam pemerintahan Dinasti Umayyah. Orang Persia ,dianggap sebagai mantan budak ( Mawla) dan meskipun sudah masuk Islam, tetap diharuskan membayar pajak khusus Non Muslim. Yang memicu orang-orang Persia bergabung dengan oposisi yang kelak meruntuhkan Dinasti Umayyah dan mendirikan Dinasti Abbasiyah pada 750 M. ( Hitti, 2006, hal.353-356)

Hal-hal ini, sangat penting untuk diteliti , karena diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintahan -pemerintahan Islam kedepannya. Juga menjadi sebuah kajian obyektif tentang Sejarah perkembangan Politik Islam. Jangan sampai ada sesuatu yang

ditutup-tutupi untuk tujuan tertentu. Karena tujuan pembelajaran Sejarah pada dasarnya adalah untuk diambil pelajarannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun, Sejarah adalah ilmu orisinil tentang kebijaksanaan, dan dapat dijadikan Pelajaran bagi orang-orang selanjutnya. ( Ibnu Khaldun, 2023, hal.9 dan 17.)

Beberapa karya Sejawat Islam maupun barat pada masa modern, telah mengambil porsi menjelaskan Sejarah Pemerintahan Dinasti Umayyah ini. Baik menjelaskan nya secara singkat, maupun panjang lebar, Penelitian-penelitian tersebut, menjelaskan Sejarah Dinasti Umayyah dari berbagai aspek. Beberapa diantaranya adalah:

1. *History Of The Arabs* karya Philip.K.Hitti, sebuah karya yang membahas Sejarah Timur Tengah mulai dari masa sebelum Islam, hingga masa pasca Khilafah Utsmani. Dalam membahas masa Khilafah Umayyah, Philip.K.Hitti membahas berbagai aspeknya, antara lain masa berdirinya, ekspansi militer, arsitektur, ilmu pengetahuan, kehidupan keluarga istana, dan lain lain hingga keruntuhannya. ( Hitti, 2006, hal.xvii)

2. *Ensiklopedi Sejarah Islam* yang ditulis oleh Tim Riset dan Studi Islam Mesir. Pembahasan Sejarah Dinasti Umayyah disini, lebih ringkas, berfokus pada uraian apa yang terjadi pada masa masing-masing khalifah. ( Tim Riset dan Studi Islam Mesir, 2019, hal.xiv-xv)

3. *Penaklukan Islam Yang Mengubah Dunia*, ditulis oleh Hugh Kennedy, seorang guru besar Fakultas Kajian Asia dan Afrika, Universitas ST.Andrew, Skotlandia, yang fokus membahas ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada abad ke 7-9 M, dan beberapa bagian diantaranya membahas ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang terjadi pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah. ( Kennedy, 2020, hal.viii dan 505)

Adapun, untuk jurnal ilmiah, ada beberapa jurnal yang cukup berbobot membahas berkaitan dengan masalah-masalah ini, diantaranya:

1. Tulisan Khalil Athamina, peneliti Universitas Birzeit, Palestina, dengan judul *Non Arab Regiments And Privat Militias During The Umayyad Period*, tulisan ini berfokus pada peran tentara-tentara Non Arab, diantaranya Zutt dan Sayabiga dalam ketentaraan Dinasti Umayyah. ( Athamina, 1998, hal.347-376)

2. Tulisan Inayatullah Bhatti, dkk dari Universitas Shah Abdul Latif Pakistan, berjudul *THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF RULERS IN THE LIGHT OF THE LIFE OF OMAR BIN ABDUL AZIZ* yang membahas pemerintahan Dinasti

Umayyah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), termasuk kebijakan-kebijakannya. Darinya, diperoleh gambaran yang cukup detil tentang pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. ( Bhati, dkk, 2023, hal.270-276)

3. Tulisan Luqman Hakim Handoko dan Saim Kayadibi yang berjudul *The Implementation Of Good Governance in the Era of Caliph Umar Ibn Abd Aziz (61 H-101 H/717-720 H)*, yang seperti tulisan Inayatullah Bhati, membahas masa keemas an Dinasti Umayyah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tepatnya mengenai mengapa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat disebut sebagai “pemerintahan yang baik”. ( Handoko dan Kayadibi, 2013, hal.133-149)

Karya-karya diatas, memberi gambaran tentang apa yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah. Namun, dua judul pertama, memuat gambaran yang terlalu umum , berhubung kedua judul pertama adalah sebuah ensiklopedi sejarah, bukan monograf yang membahas satu topik secara khusus. Meski demikian, gambaran yang diberikan dua karya diatas tentang kronologi peristiwa-peristiwa penting saat masa kekuasaan Dinasti Umayyah. Karya Kennedy tidak fokus membahas tentang Sejarah Bani Umayyah. Bab babnya diklasifikan secara geografis, semisal bab 1 untuk Penaklukan Suriah dan Palestina, bab 2 untuk Penaklukan Irak, dan sebagainya, sehingga Sejarah penaklukan di masa Bani Umayyah bisa terpecah di berbagai bab. Kiranya gambaran yang komprehensif tentang kronologi dan kehidupan di masa Bani Umayyah dan sangat membantu dalam penelitian ini, adalah karya Philip.K.Hitti yaitu *History Of The Arabs*.

Untuk jurnal-jurnal, kiranya kesemua jurnal yang kami gunakan memberikan keterangan yang komprehensif mengenai topiknya. Hanya saja dalam tulisan Luqman Hakim Handoko dan Saim Kayadibi, ada penanggalan Hijriyah yang tidak akurat untuk 717-720 M, yaitu 61-101 H. Berdasarkan Situs *Ensiklopedia Islam*, tahun masehi 717 M setara dengan 99 Hijriyah, artinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah 717-720 M/99-101 H. (Pulungan, tanpa tahun)

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu membahas suatu gejala sosial di masa lampau. (Kartodirjo, 2019, hal.163-164). Adapun teori sosial yang digunakan, adalah teori Ibnu Khaldun tentang tindakan ofensif yang membahayakan Kerajaan dan menyebabkan kehancuran. ( Ibnu Khaldun, 2023, hal.331). Sebagaimana akan kita lihat nantinya,kebijakan diskriminatif dan intoleran itulah yang menjadi salah satu faktor utama kehancuran Dinasti Umayyah Pada 750 M.

Adapun, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah . Metode ini, terdiri dari heuristik atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik primer maupun sekunder, kritik sumber, interpretasi ( analisis fakta sejarah, dan historiografi atau penulisan sejarah. (Abdurrahman, 2019, hal.104-117)

Sumber primer , menurut Louis Gottschalk, adalah sumber yang berupa kesaksian seorang saksi tentang sejarah tersebut, atau sumber yang sezaman, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang ditulis oleh orang yang tidak hidup pada masa tersebut. ( Gottchalk, 1986, hal.35).

Sumber primer dalam penelitian ini adalah *Kitab Futuhul Buldan* karya Al-Baladzuri, seorang sejarawan asal Baghdad, Irak, yang wafat pada 892 M. Karya ini berkisah tentang perkembangan ekspansi Islam dari masa Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Wasallam* hingga masa Abbasiyah . Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Futuhul Buldan: Penaklukan Negeri-negeri Dari Fathu Makkah* ( Baladzuri, 2015, hal.xi, xviii,xxi,dan xxxiii) . Melihat tahun wafatnya Baladzuri, tidak menutup kemungkinan karya ini ditulis sekitar pertengahan abad ke 9 M, tidak jauh setelah keruntuhan Dinasti Umayyah pada 750 M. Sumber primer lainnya adalah *Tarikh Khalifa bin Khayyat* , yang mana karya ini telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *Khalifa ibn Khayyat s History on The Umayyad Dynasty 660-750* , yang mengisahkan sejarah kekuasaan Dinasti Umayyah 660-750 M. Penulisnya , Khalifa bin Khayyat/Ibn Khayyat ,hidup antara 776/777-854/855 .M ( Ibn Khayyat , 2014, VIII dan 1). Tentu saja, jarak antara masa hidup penulis dengan kejadian-kejadian sejarahnya tidak begitu jauh.

Sumber primer lainnya, yang tidak sezaman namun memuat kesaksian-kesaksian/periwayatan sezaman, tentu saja *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* karya Abu Jafar Muhammad al-Tabari (839-923 ). Kami menggunakan beberapa jilid dari karya ini, yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, antara lain Jilid 23 dengan judul *The History Of Al-Tabari Volume XXIII : The Zenith Of The Marwanid House* yang banyak membahas penaklukan-penaklukan di masa Dinasti Umayyah ( Al-Tabari, 1990, hal.V dan VII-X). Dan juga jilid 27 yang membahas keruntuhan Dinasti Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah dengan judul *The History Of Al-Tabari Volume XXVII: The Abbasid Revolution* . (Al-Tabari, 1990, hal.ix-xi).

Selain karya Al-Tabari tersebut, kami juga menggunakan jilid 2 dari karya Ibn Saad ( 764-845 M) yang berjudul *Kitab al-Tabaqat* yang memuat biografi beberapa

tokoh Muslim awal, termasuk di masa Dinasti Umayyah. Edisi yang kami gunakan adalah terjemahan Inggris oleh Aisha Bewley dengan judul *The Men Of Medina Volume II*. ( Ibn Saad, 2000, iii)

Adapun sumber-sumber sekunder, kami menggunakan beberapa buku yang ditulis para sarjana modern maupun jurnal-jurnal yang relevan seperti *The History Of Arabs* karya Philip.K.Hitti, *Penaklukan Muslim Yang Mengubah Dunia* oleh *Hugh Kennedy*, dan lainnya. Sebagiannya telah dibahas diatas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Intoleransi dalam Aksi Militer dan Kebijakan Politik oleh Dinasti Bani Umayyah: Kajian Catatan Arab Awal**

Aksi intoleransi , berupa penghancuran tempat ibadah di wilayah yang menjadi target kampanye militer oleh Militer Dinasti Umayyah , telah terabadikan dalam sumber-sumber awal. Salah satu peristiwa terawal adalah penumpasan pemberontakan Abdullah bin Zubair pada 683 M. Abdullah bin Zubair, adalah salah satu oposisi Umayyah yang diproklamirkan penduduk Hijaz sebagai khalifah dan menentang otoritas Dinasti Umayyah yang saat itu dipegang Khalifah Yazid bin Muawiyah. Menurut karena sikap Yazid yang suka berfoya-foya. (Hitti, 2006, hal.238)

Sebagai reaksi, Yazid mengirim pasukan dibawah Muslim bin Uqbah untuk menyerang Madinah yang merupakan sebuah kota penting di Hijaz pada 26 Agustus 683 M dan berhasil mengalahkan para pengikut Abdullah bin Zubair dalam Pertempuran Harrah hingga Abdullah bin Zubair sendiri lari ke Makkah dan dikejar Tentara Umayyah. ( Hitti, 2006, hal.238). Khalifah bin Khayyat mencatat , dalam pengejaran itu, Muslim bin Uqbah wafat dan komando Pasukan Umayyah dipegang oleh Husain bin Numair al-Kindi. Pasukan Umayyah dibawah Husain bin Numair mengepung Makkah. Dan, tidak hanya itu saja, menurut Ibn Khayyat, mereka juga membombardir Kabah, situs tersuci bagi Umat Islam di Makkah dengan ketapel raksasa (mangonel) hingga situs suci tersebut terbakar. ( Ibn Khayyat, 2014, hal.110).

Apa yang dicatat Ibn Khayyat ini, tentu saja mencengangkan. Dalam Islam, Kabah merupakan situs yang sangat sakral, mengingat fungsinya sebagai tempat ritual Thawaf dalam haji atau umrah. ( Al-Fauzan, 2015, hal.456). Namun, apa yang dilakukan oleh Pasukan Umayyah di tempat ini, juga mencerminkan apa yang mereka lakukan di situs-situs agama lainnya saat kampanye militer.

Sindh/Pakistan merupakan sasaran ekspedisi militer Pasukan Umayyah dibawah komando Muhammad bin Qasim antara 710-712 M. ( Hitti, 2006, hal.263). Baladzuri mencatat bahwa ekspedisi ini diinisiasi Gubernur Umayyah di Irak, Al-Hajjaj bin Yusuf. Kasus awalnya adalah penguasa Pulau Yaqut mengirimkan beberapa Wanita Muslimah dari negerinya kepada Hajjaj , lewat kapal, dan akhirnya kapal itu dibajak beberapa pembajak dari Daibul , sebuah kota penting di Sindh. Hajjaj meminta Dahir agar meminta para pembajak membebaskan para wanita tersebut, namun Dahir enggan. Al-Hajjaj mengirim pasukan dibawah Ubaidillah bin Nabhan ke Sindh, tepatnya ke Daibul. Ubaidillah meninggal dalam peristiwa itu dan ekspedisi gagal. ( Baladzuri, 2015, hal.593-594)

Akhirnya, Al-Hajjaj memerintahkan Komandan Muhammad bin Qasim dengan 6000 pasukan dari Suriah. Pasukan ini dilengkapi kapal-kapal perang dan ketapel raksasa. Pasukan ini mengepung Daibul, dan menurut Baladzuri, pasukan ini menembakkan ketapel raksasa ke arah Badd. Badd adalah sebuah menara yang disakralkan penduduk setempat dan tempat menyimpan patung-patung mereka. Menara Badd , dikisahkan berbentuk mercusuar dengan tiang kapal yang panjang dengan bendera berwarna merah yang dapat berputar mengelilingi kota jika terkena angin. Bagian tiang pancang ditembak dengan ketapel hingga patah. Muhammad bin Qasim, juga membunuh Sadan, seorang yang dipercaya menjaga rumah dewa-dewa penduduk setempat,. ( Baladzuri, 2015, hal.595-596)

Kejadian yang lebih parah, terjadi saat penaklukan Samarkand oleh Pasukan Umayyah dibawah Qutaibah bin Muslim pada 712 . ( Kennedy, 2020, hal. 337). Al-Tabari mencatat , Pasukan Umayyah mengepung Samarkand yang dikuasai Pemerintahan Soghdia selama satu bulan. Raja Soghdia, Ghurak, meminta bantuan pada Raja al-Shash dan Raja Ikhsad dari Ferghana. Pengepungan dilakukan dengan ketapel-ketapel raksasa .Pasukan yang mempertahankan Samarkand terdiri dari Pasukan Turki, al Shash, dan Ferghana. Setelah pengepungan sekian lama, Ghurak akhirnya menyerahkan Samarkand pada Qutaibah. ( Al-Tabari, 1990, hal.189-198)

Masih menurut Al-Tabari, setelah Samarkand berhasil diduduki, Qutaibah mengeluarkan kebijakan bahwa Non Muslim yang memasuki Samarkand, harus diberi cap tanah liat pada tangannya. Jika cap itu mengering sebelum ia keluar, ia harus dibunuh. ( Al-Tabari, 1990 , hal.199)

Baladzuri mencatat, bahwa Qutaibah mengeluarkan patung-patung yang disakralkan di Samarkand, lalu membakarnya serta mengambil perhiasannya. Orang-orang Persia di Samarkand memperingatkan Qutaibah agar tidak melakukan penghinaan terhadap patung-patung itu, namun Qutaibah tetap membakarnya. ( Baladzuri, 2015, hal.576)

Khalifah Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik ( memerintah 705-715 M) juga memiliki kebijakan yang tidak kalah kontroversial terhadap Non Muslim. Baladzuri mencatat bahwa beliau memiliki keinginan memperluas Masjid Damaskus dengan merobohkan Gereja Yohanes milik Kaum Kristen Damaskus. Orang-orang Kristen menolak ide tersebut. Khalifah Al-Walid, dengan bantuan sejumlah pekerja merobohkan gereja dan memperluas masjid ke reruntuhan gereja itu, Baru pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ( memerintah 717-720 M), gereja tersebut dikembalikan pada Kaum Kristen setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendengar pengaduan orang-orang Kristen tersebut. ( Baladzuri, 2015, hal. 159-160 dan Hitti, 2006, hal.255)

### **Upaya Reformasi: Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M)**

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, melakukan berbagai upaya untuk menghentikan tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan para pendahulunya. Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi yang cukup radikal. Beliau meminta agar penaklukan wilayah-wilayah dihentikan dan kebijakan lebih difokuskan untuk mengenalkan Islam dengan keteladanan yang baik pada warga di daerah yang telah ditaklukan. ( Lathif, 2023, hal.226)

Khalifah Umar lebih memfokuskan pengiriman juru dakwah terbaik ke daerah-daerah penaklukan. Selain menggunakan strategi diplomatik berupa pengiriman surat pada para penguasa di Asia Tengah dan Sindh, yang merupakan daerah-daerah yang telah ditaklukan Dinasti Umayyah, yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Setelah melihat perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, banyak dari raja-raja tersebut masuk Islam. Sebagai apresiasi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberi mereka otonomi untuk mengelola daerah kekuasaan mereka . (Lathif, 2023, hal.226)

Reformasi yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tentu saja menghentikan tindakan intoleransi yang maklum terjadi saat Pasukan Umayyah memasuki suatu wilayah untuk melakukan kampanye militer. Khalifah Umar juga



menghentikan kebijakan buruk dari pemerintahan sebelumnya, Dimana penduduk daerah-daerah taklukan yang sudah masuk Islam ,diharuskan membayar Jizyah dengan alasan Keislaman mereka tidak tulus. Kebijakan ini diterapkan oleh beberapa kepala daerah. Para kepala daerah juga mengadakan kebijakan pemaksaan sunat bagi warga yang baru masuk Islam. Kebijakan diskriminatif ini, dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. ( Lathif, 2023, hal.223)

Demikian pula yang ditulis Ibn Saad dalam Kitab *at-Tabaqat* bahwa Umar bin Abdul Aziz menghapus penarikan Jizyah dari orang-orang Muslim. Ibn Saad juga menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperbolehkan Orant-orang Yahudi dan Kristen memiliki wakaf untuk tempat ibadah mereka ( Ibn Saad, 2000, hal. 215 dan 221)

Pandangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, penaklukan sudah tidak diperlukan , karena semua orang pada akhirnya akan menerima Islam saat mereka mengetahui bahwa Islam adalah sumber kebahagiaan. ( Lathif, 2023, hal.226)

Baladzuri, mencatat tentang kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Wilayah Sindh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyeru para penguasa lokal masuk Islam melalui jalur surat menyurat. Penguasa lokal yang masuk Islam, tetap berkuasa di wilayahnya masing-masing dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan Umat Islam lainnya . (Baladzuri, 2015, hal.601)

Baladzuri, juga mencatat bahwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekelompok orang Samarkand menghadap padanya dan mengadakan sikap Qutaibah bin Muslim saat memasuki dan menduduki kota mereka, yang mereka anggap sebagai pengkhianatan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membentuk sebuah pengadilan yang bertugas memutuskan, apakah Kaum Muslimin tetap berada di Samarkand atau dideportasi. Pengadilan itu, diampuh oleh Jami bin Hadhira an-Naji. Penduduk Samarkand pada akhirnya lebih memilih Kaum Muslimin hidup diantara mereka. ( Baladzuri, 2015, hal.576)

Demikian pula catatan Baladzuri tentang kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Asia Tengah dan Khurasan ( kini bagian Timur Iran). Khalifah Umar mengajak para penguasa lokal di Asia Tengah masuk Islam melalui surat, dan Sebagian dari mereka masuk Islam. Penguasa Umayyah di Khurasan saat itu adalah Al-Jarrah bin Abdullah. Al-Jarrah mengirim Panglima Abdullah bin Mamar melakukan kampanye

militar di Asia Tengah, bertekad memasuki Cina. Ekspedisi ini dapat dikalahkan orang-orang Turki . ( Baladzuri, 2015, hal.583)

Selanjutnya, Khalifah Umar menghapuskan pajak bagi para mualaf dari kalangan Penduduk Khurasan serta membagikan tanah pada para mualaf. Al-Jarrah mengirim surat pada Khalifah Umar yang isinya, sebagaimana diceritakan Baladzuri, “Tiada yang layak diberikan kepada Penduduk Khurasan kecuali pedang”. Khalifah Umar merespons dengan memberhentikan Al-Jarrah. (Baladzuri, 2015, hal.583). Kebijakan ini, dapat dikatakan sebagai tindakan serius Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghentikan intoleransi yang sudah mengakar. Dalam penelitiannya tentang masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Peneliti Luqman Hakim Handoko dan Saim Kayadibi menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberi perintah untuk memperlakukan Non Muslim dengan adil dan tidak mengganggu tempat ibadah mereka. (Handoko dan Kayadibi, 2013, hal.40)

Tidak cukup sampai disitu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mendengar aspirasi dari Kaum Kristen Damaskus yang mengeluhkan gereja mereka, yaitu Gereja Yohanes , yang telah diambil oleh Al-Walid dalam rangka perluasan masjid. Khalifah Umar menulis surat pada Gubernur Damaskus untuk mengembalikan gereja tersebut. Umat Islam di Damaskus menolak kebijakan ini. Meski akhirnya dengan bantuan seorang ahli fikih bernama Sulaiman al-Muharibi, kesepakatan berhasil dicapai . Umat Islam membiarkan Gereja Yohanes untuk Umat Kristen dan Umat Kristen memberikan Gereja al-Ghauthah yang pernah mereka ambil secara paksa dari Umat Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diceritakan Baladzuri, merasa senang dengan langkah ini. (Baladzuri, 2015, hal.576)

Singkatnya, upaya reformasi yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak dapat dilanjutkan di masa masa setelahnya. Terbukti dengan merebaknya kembali diskriminasi terhadap Non Arab di masa selanjutnya, yang menjadi sebab keruntuhan Dinasti Umayyah. Sejarawan Mesir kontemporer, Prof.DR.Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif, menyayangkan singkatnya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan kalimatnya:

*“Hidup khalifah bijak ini tidak berlangsung lama. Tampak kematian sudah menjemputnya sebelum ia melampaui usia empat puluh tahun. “ ( Lathif, 2023, hal.228)*

Peneliti Pakistan, DR.Inayatullah Bhatti, menyebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai seseorang yang menjadikan keadilan sebagai gerbangnya. (Bhati, dkk,

2023, hal.975). Hal itulah yang tidak berlanjut di masa masa setelahnya, yang menyebabkan keruntuhan Dinasti Umayyah.

### **Kebijakan-Kebijakan Diskriminatif Pasca Kepemimpinan Umar Ibn Abdul Aziz**

Masa pemerintahan Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz (717–720 M) menjadi momen penting dalam perubahan sosial politik Dinasti Umayyah. Ia dikenal sebagai khalifah yang berupaya menghapus kesenjangan antara kaum Muslim Arab dan non-Arab (mawālī). Dalam kebijakannya, Umar II menghapus kewajiban pembayaran jizyah bagi mawālī yang telah memeluk Islam serta memberi mereka kedudukan yang setara dalam bidang sosial, hukum, dan pemerintahan. (Jahan, 2021, hal. 3)

Namun, langkah reformasi ini justru menyebabkan masalah keuangan negara, karena banyaknya dzimmī (non-Muslim) yang masuk Islam membuat pemasukan pajak menurun. Setelah Umar II wafat, kebijakan tersebut dihentikan oleh para khalifah sesudahnya, dan sistem diskriminatif terhadap non-Arab kembali diberlakukan seperti sebelumnya.

Yazīd bin ‘Abd al-Malik (720-724) kembali memberlakukan jizyah bagi Muslim non-Arab, seolah mereka masih tergolong non-Muslim, serta membatasi kesempatan mereka untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan dan ketentaraan. Para muallaf ini menempati starta sosial paling rendah dalam komunitas Islam. (Hitti, 2006, hal. 290). Kekuasaan dan kedudukan istimewa hanya diperuntukkan bagi kalangan Arab Suriah yang dianggap paling loyal terhadap dinasti.

Hal ini menimbulkan pemberontakan Yazīd ibn al-Muhallab di Basrah pada tahun 720 M, tak lama setelah wafatnya Umar II. (Athamima, 1998, hal. 371). Sebagai mantan gubernur Khurasan dari suku Azd, Yazīd menolak kebijakan pajak yang sewenang-wenang dan menyerukan keadilan bagi kaum non-Arab. Gerakannya memperoleh dukungan besar dari mawālī di Irak dan Persia, yang menganggapnya sebagai tokoh yang akan menghidupkan kembali semangat kesetaraan Islam seperti di masa Umar II. Meskipun pasukan Yazīd sempat menguasai Basrah dan sebagian Persia selatan, pemberontakan itu akhirnya dipadamkan oleh pemerintahan Umayyah di masa Yazīd II. Kendati gagal, gerakan ini menandai munculnya kesadaran politik di kalangan mawālī terhadap ketimpangan yang mereka alami. ((Athamima, 1998, hal. 372).

Kebijakan diskriminatif ini semakin dilembagakan secara formal pada masa pemerintahan Hishām bin ‘Abd al-Malik (724–743 M). Ia memperkuat struktur

birokrasi berbasis kesukuan Arab khususnya suku Qays dan Mudar dan menempatkan mawālī sebagai lapisan sosial bawah tanpa hak politik. Dalam bidang militer, mereka hanya berperan sebagai tenaga pembantu atau staf administratif dan tidak memperoleh kedudukan maupun gaji yang setara dengan pasukan Arab. (Athamima, 1998, hal. 369-71).

Diskriminasi tersebut sangat terasa di wilayah timur seperti Irak, Khurasan, dan Transoxiana, di mana para gubernur Arab memaksa Muslim non-Arab tetap membayar *kharāj* dan *jizyah*, meskipun telah memeluk Islam. Kondisi ekonomi yang menindas ini memicu beberapa perlawanan lokal pada dekade 730-an, antara lain di Bukhara (733 M) dan Samarqand (737 M). ketegangan di kawasan tersebut diperparah oleh perebutan tanah pertanian serta ketimpangan dalam pembagian gaji antara tentara Arab dan mawālī. Hal inilah dalam beberapa kasus mawālī bergabung dengan kelompok pemberontak dari Syi'ah maupun Khawarij. (Hitti, 2006, hal. 290).

Keadaan kian memburuk pada masa al-Walīd II (743–744 M) dan Yazīd III (744 M). Walīd II dikenal lebih sibuk dengan kesenangan pribadi, seperti minum-minuman keras dan suka berpoya-poya. Diriwayatkan, ia biasa berendam di kolam anggur sehingga ia tidak mementingkan urusan pemerintahan, sehingga para gubernur daerah bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat non-Arab. (Hitti, 2006, hal. 284). Di Persia, mawālī dan petani Persia dibebani pajak berlapis dan dilarang memiliki tanah, sedangkan di Khurasan mereka diperlakukan seperti budak oleh tentara Arab.

Ketika Yazīd III menggantikan Walīd II, ia sempat berusaha meniru gaya kepemimpinan Umar II yang saleh dan adil, namun kebijakannya tidak menyentuh persoalan sosial-ekonomi yang sudah mengakar. Pada masa inilah muncul pemberontakan Zayd ibn ‘Alī (740 M) di Kufah, yang disokong banyak mawālī karena menggabungkan tuntutan keagamaan dengan perjuangan melawan ketidakadilan politik Umayyah. Meskipun gerakan Zaydiyyah akhirnya dipatahkan, kealahannya justru memperkuat tekad mawālī untuk mencari perubahan yang lebih mendasar. Di Khurasan, gubernur Naṣr ibn Sayyār (738–748 M) gagal menenangkan keresahan kaum mawālī. Ia berusaha memediasi konflik antara suku Arab Qays dan Yaman, tetapi justru memperparah situasi karena tetap mempertahankan perbedaan status antara Arab dan non-Arab. (Hitti, 2006, hal. 354).

Ketika Marwān II (744–750 M) naik sebagai khalifah terakhir Umayyah, diskriminasi terhadap non-Arab mencapai puncaknya. Marwān II berusaha memperkuat

militernya dengan merekrut pasukan non-Arab dari Persia dan Khurasan, namun mereka tetap diperlakukan sebagai bawahan tanpa hak. Kebijakan ini justru memperbesar solidaritas mawālī dan mendorong mereka bergabung dengan gerakan rahasia Hāshimīyah, jaringan propaganda Abbasiyah yang menjanjikan kesetaraan antar-Muslim. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasānī, seorang mawālī Persia yang karismatik dan berpengalaman dalam organisasi militer. Pada tahun 747 M, Abu Muslim memimpin pemberontakan besar di Merv, dan dalam dua tahun berhasil menguasai Nishapur, Herat, dan Kufah. (Al-Tabari, 1985, hal. 93). Dengan mengibarkan bendera hitam, simbol perjuangan Abbasiyah, ia berhasil menghimpun kekuatan mawālī dan suku Yaman yang menentang dominasi Arab Quraisy.

### **Peranan Golongan Mawali dalam Runtuhnya Dinasti Umayyah**

Masa pemerintahan Khalifah Marwān bin Muḥammad (744–750 M) merupakan bab terakhir dari kekuasaan Bani Umayyah yang diwarnai oleh krisis politik, konflik suku, dan pemberontakan besar di berbagai wilayah kekhalifahan. Dalam konteks inilah golongan mawālī (umat Islam non-Arab), terutama dari Persia, Khurasan, dan Transoxiana yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mempercepat kejatuhan dinasti. Diskriminasi ekonomi, sosial, dan politik yang mereka alami sejak masa al-Walīd I hingga Marwān II melahirkan solidaritas yang menjelma menjadi kekuatan revolusioner di bawah panji al-Da‘wah al-Hāshimīyah, jaringan politik rahasia yang kelak menjadi fondasi Daulah ‘Abbāsiyyah.

Ketika Marwān II naik takhta (127 H / 744 M), kekhalifahan berada dalam situasi kacau. Ia harus menghadapi pemberontakan penduduk Homs, serta serangkaian pemberontakan Khawarij di Irak dan Jazīrah yang melemahkan stabilitas negara. Dalam situasi itu, provinsi-provinsi timur, khususnya Khurasan yang menjadi wilayah paling genting, dimana suku-suku Arab Yaman dan Qays terlibat konflik internal, sementara kaum mawālī (Muslim non-Arab) menderita penindasan pajak dan sosial yang berkepanjangan. Mereka tetap dipungut jizyah meskipun telah memeluk Islam dan dilarang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara penguasa pusat yang beretnis Arab Suriah dengan masyarakat lokal yang mayoritas non-Arab. (Al-Tabari, 1985, hal. 13).

Diskriminasi yang dilakukan oleh Umayyah ini, menciptakan terbentuknya koalisi antara keturunan Abbas, Syi’ah dan Mawali (Khurasan), koalisi ini

dimanfaatkan oleh keturunan Abbas untuk kepentingan mereka merebut kekhilafahan. Koalisi ini dipimpin oleh Abdullah Ibn Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Abu al-Abbas al-Saffah. Di bawah kepemimpinannya, Islam revolusioner bangkit menentang tatanan yang sudah ada dengan menawarkan gagasan teokrasi dan janji untuk kembali pada tatanan yang seharusnya. (Hitti, 2006, 354).

Pada tahun 129 H / 747 M muncul tokoh mawālī asal Persia bernama Abū Muslim al-Khurāsānī yang merupakan pendukung keturunan Abbas. Ia secara terbuka menyerukan revolusi ‘Abbāsiyyah di Marw, menandai awal dari perlawanan terorganisir terhadap kekuasaan Umayyah. (Hitti, 2006, 354). Abū Muslim berhasil mempersatukan kelompok mawālī, kaum petani Persia (dahāqin), dan suku-suku Yaman yang kecewa terhadap kebijakan diskriminatif penguasa Arab. Dalam waktu singkat, kekuatannya merebut kota-kota penting seperti Marwrudh, Nishapur, dan Herat, dan mengalahkan garnisun-garnisun Arab yang menjadi simbol kekuasaan Umayyah di timur. (Al-Tabari, 1985, hal. 93).

Pada tahun 130–131 H (747–749 M), pasukan mawālī di bawah komando Qaḥṭabah bin Shabīb, seorang perwira Khurasan yang setia kepada Abū Muslim, bergerak menuju barat. Mereka menaklukkan Rayy, Nihāwand, dan akhirnya Kufah, pusat politik penting di Irak. Dalam peristiwa ini, peran mawālī menjadi sangat dominan: mereka adalah mayoritas pasukan tempur yang mendirikan pemerintahan baru di bawah pengaruh propaganda ‘Abbāsiyyah. Setelah Kufah direbut, Abū al-‘Abbās as-Saffāḥ diangkat sebagai khalifah pertama Abbasiyah pada tahun 132 H / 749 M. (Hitti, 2006, hal. 355). Para mawālī Khurasan menjadi tulang punggung penobatan tersebut, sebagaimana disebut oleh al-Ṭabarī: “Kaum Khurasaniyyun adalah pedang yang menegakkan pemerintahan Abbasiyyah.”.

Puncak perjuangan mawālī terjadi dalam Pertempuran Sungai Zab (132 H / 750 M). Dalam pertempuran ini, pasukan ‘Abbāsiyyah yang sebagian besar terdiri dari mawālī Persia berhadapan dengan tentara Umayyah yang didominasi orang Arab Suriah. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi keunggulan strategi dan disiplin pasukan mawālī Khurasan memastikan kemenangan total di pihak ‘Abbāsiyyah. Khalifah Marwān II melarikan diri ke Mesir, di mana ia akhirnya terbunuh — peristiwa yang menandai berakhirnya secara resmi kekuasaan Bani Umayyah. (Al-Tabari, 1985hal. 161-162).

Dari perspektif sosial-politik, peranan mawālī dalam keruntuhan Umayyah dapat dilihat dalam tiga ranah utama. Pertama, ranah sosial-ekonomi, di mana ketidakadilan pajak, eksploitasi tanah, dan marginalisasi pekerjaan administratif menciptakan solidaritas di antara mereka. Kedua, ranah militer, di mana mawālī menjadi kekuatan bersenjata profesional yang mampu menggantikan pasukan Arab tradisional. Ketiga, ranah ideologis, karena revolusi ‘Abbāsiyyah memanfaatkan narasi kesetaraan Islam yang sangat resonan di kalangan mawālī.

## KESIMPULAN

Intoleransi dan diskriminasi dalam masa pemerintahan Dinasti Umayyah , merupakan sebuah masalah serius yang pada akhirnya meruntuhkan dinasti itu sendiri. Secara tidak langsung, praktik diskriminasi terhadap Muslim Non Arab, atau yang disebut dengan Kaum Mawali, telah memprovokasi orang-orang tersebut bergabung dengan oposisi bersenjata yang pada 750 M, meruntuhkan dinasti ini dan mendirikan Khilafah Abbasiyah. Reformasi yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menciptakan pemerintahan yang lebih toleran pada Non Muslim dan Non Arab serta menjadikan Dinasti Umayyah sebagai pemerintahan yang inklusif dan menghentikan corak militerisme, hanya bertahan di masa pemerinrahan beliau dan tidak mampu dilanjutkan para penerus Khalifah Umar bin Abdul Aziz. . Mandeknya upaya membangun pemerintahan yang toleran dan inklusif, telah mempercepat keruntuhan Khilafah Umayyah pada 750 M.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Primer:

Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir ( 1990) . *The History Of Tabari Volume XXIII: The Zenith Of Marwanid House* ( Diterjemahkan oleh Martin Hinds). Albany: State University Of New York Press.

-----: (1985). *The History Of Tabari Volume XXVII: The Abbasid Revolution* ( Diterjemahkan oleh John Alden Williams). Albany: State University Of New York Press.

Khayyat, Khalifa ibn ( 2015). *Khalifa ibn Khayyat s History On The Umayyad Dynasty 660-750* (Diterjemahkan oleh Carl Wurtzel). Liverpool: Liverpool University Press.

Al- Baladzuri, Syaikh ( 2015). *Futuhul Buldan: Penaklukan Negeri-negeri dari Fathu Makkah Sampai Negeri Sind* (Diterjemahkan oleh Masturi Irham dan Abidin Zuhri). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ibn Saad, Muhammad (2000) . *The Men Of Medina Vol.II* (Diterjemahkan oleh Aisha Bewley), London: Ta Ha Publisher.

### **Sumber Sekunder:**

Hitti, Philip.K. (2006) . *The History Of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam* (Diterjemahkan oleh R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi). Jakarta: Serambi.

Kennedy, Hugh ( 2020). *Penaklukan Muslim Yang Mengubah Dunia* (Diterjemahkan oleh Ratih Ramelan) . Jakarta: Alvabet.

Tim Riset dan Studi Islam Mesir ( 2019). *Ensiklopedi Sejarah Islam* (Diterjemahkan oleh M.Taufik Ali, Arif Munandar Riswanto, dkk). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Abdullathif, Prof.DR Abdussyafi Muhammad ( 2014). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah* (Diterjemahkan oleh Masturi Irham dan Malik Supar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Khaldun, Ibnu ( 2023). *Mukaddimah: Sebuah Karya Mega Fenomenal dari Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan* (Diterjemahkan Masturi Irham , Malik Supar, dan Abidun Zuhri). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Kartodirdjo, Sartono (2019). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Abdurrahman, Dudung ( 2019). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Gottchalk, Louis (1986). *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto), Jakarta: UI Press.

Al-Fauzan, Syaikh DR.Shalih bin Fauzan ( 2015). *Ringkasan Fikih Lengkap* (Diterjemahkan oleh DRS.Asmuni) . Bekasi: Darul Falah.

### **Artikel Jurnal:**

Handoko, L. H., & Kayadibi, S. (2013). The implementation of good governance in the era of caliphate Omar ibn Abd Al-Aziz (61h-101 H/717-720 M). *Global Review*



of *Islamic Economics and Business*, 1(2), 133-149.  
<https://doi.org/10.14421/grieb.2013.012-04>

- Bhatti, I., Solangi, A., Shoaib, M., & Fatima, S. (2023). THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF RULERS IN THE LIGHT OF THE LIFE OF OMAR BIN ABDUL AZIZ. *Russian Law Journal*, 11(4), 970-977. [THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF RULERS IN THE LIGHT OF THE LIFE OF OMAR BIN ABDUL AZIZ – тема научной статьи по философии, этике, религиоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка](#)
- Jahan S. M. ( 2020) DOWNFALL OF THE Umayyads ( an Appraisal). Jamia Millia Islamia. [01. Downfall of Umayyads April 27 2020 -libre.pdf](#)
- ‘Athamina, K. (1998). Non-Arab Regiments and Private Militias during the Umayyād Period. *Arabica*, 347-378. [Non-Arab regiments and private militias during the umayyd period.pdf](#)

#### **Artikel Online**

- Pulungan, J.Suyuti ( tanpa tahun). Umar bin Abdul Aziz, dari *Ensiklopedia Islam*, situs web: [Umar Bin Abdul Aziz - Ensiklopedia Islam](#), diakses 31 Oktober 2025, 21: 21 WIB.